

Peran Mahasiswa sebagai Kontrol Politik bagi Pelaksanaan Politik Pariwisata di Pulau Komodo Kab. Manggarai Barat Tahun 2020–2022

Tonny Abner Serang^{*1}, Franky Roring²
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno^{1,2}

^{*1}e-mail: tonny042317@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mahasiswa asal Kabupaten Manggarai Barat yang berada di Jakarta sebagai kontrol politik terhadap pelaksanaan politik pariwisata di Pulau Komodo pada periode 2020 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam gerakan mahasiswa. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori struktural fungsional, teori sistem, dan teori demokrasi untuk menjelaskan dinamika hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dalam konteks kebijakan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata di Pulau Komodo belum sepenuhnya selaras dengan kondisi sosial, ekonomi, hukum, dan budaya masyarakat lokal. Kebijakan yang cenderung tidak partisipatif dan kurang melibatkan masyarakat memunculkan berbagai konflik dan ketimpangan. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dengan melakukan aksi demonstrasi, advokasi, serta komunikasi politik untuk memperjuangkan hak masyarakat lokal. Peran ini mendorong terciptanya proses demokratisasi yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Kata kunci : Gerakan Mahasiswa; Kebijakan Publik; Kontrol Politik; Politik Pariwisata; Pulau Komodo.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of students from West Manggarai Regency residing in Jakarta as political control agents in the implementation of tourism politics on Komodo Island during the 2020 to 2022 period. This research employs a qualitative approach with data collection techniques including in depth interviews and documentation involving informants directly engaged in student movements. Data analysis is conducted through stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theoretical framework applies structural functional theory, systems theory, and democratic theory to explain the dynamics between government, society, and student movements in the context of tourism policy. The findings reveal that government policies related to infrastructure development and tourism management in Komodo Island are not fully aligned with the social, economic, legal, and cultural conditions of local communities. Policies that are less participatory and lack community involvement have resulted in conflicts and inequalities. In response, students act as agents of change and social control by organizing demonstrations, advocacy, and political communication to defend local community rights. This role contributes to fostering a more inclusive and just democratization process in tourism governance. Therefore, participatory and community oriented policies are necessary to ensure sustainable welfare for local communities.

Keywords : Komodo Island; Political Control; Public Policy; Student Movement; Tourism Politics.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana unsur-unsur dalam negara berperan secara optimal dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dalam konteks penyelenggaraan negara, Indonesia telah lama menganut sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi dimaknai sebagai suatu sistem yang

memberikan ruang keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan dan dinamika, seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, serta perluasan ruang partisipasi publik yang terkadang belum diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang memadai. Demokrasi di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menegaskan prinsip permusyawaratan dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai pemerintahan oleh rakyat yang memberikan hak kepada warga negara untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Atmaja, 2011).

Pemerintahan di tangan rakyat mengandung tiga pengertian utama sebagaimana dikemukakan oleh Schumpeter (2011), yaitu bahwa pemerintahan dari rakyat merupakan pemerintahan yang memperoleh legitimasi atau pengakuan sah dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selanjutnya, pemerintahan oleh rakyat dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan atas nama rakyat, sehingga setiap kebijakan dan tindakan pemerintah mencerminkan kehendak kolektif masyarakat. Adapun pemerintahan untuk rakyat berarti bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah ditujukan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, sehingga orientasi utama dari setiap kebijakan publik adalah memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam kerangka demokrasi tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai bagian dari *civil society* yang berperan sebagai agen perubahan. Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan nilai kesetaraan dan non-subordinasi dalam kehidupan bermasyarakat, serta berkontribusi dalam mengawal jalannya kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Peran ini menuntut mahasiswa untuk tidak bersikap apatis, melainkan aktif dalam menyuarakan aspirasi dan melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu bidang yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah politik pariwisata, yaitu perpaduan antara konsep politik dan pariwisata yang mencakup aktivitas pemerintah maupun masyarakat dalam mengelola sumber daya pariwisata. Politik dalam pengertian klasik dipandang sebagai upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, sebagaimana dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles (Budiardjo, 2008).

Fenomena politik pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Kecamatan Komodo, menunjukkan adanya kecenderungan dominasi kepentingan elite politik dalam pengelolaan sektor pariwisata. Pembangunan yang dilakukan sering kali lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan pariwisata semata tanpa mempertimbangkan dampak sosial, budaya, serta lingkungan bagi masyarakat lokal dan keberlangsungan ekosistem, termasuk satwa di Pulau Komodo. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan sosial, konflik lahan, serta marginalisasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya pariwisata. Dalam hal ini, kontrol politik menjadi penting sebagai mekanisme untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menyimpang dari kepentingan masyarakat serta menawarkan solusi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Subakti, 2014).

Peran mahasiswa Manggarai Barat menjadi krusial dalam merespons berbagai persoalan tersebut. Mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai kelompok intelektual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Melalui organisasi kedaerahan seperti Ikatan Keluarga Mahasiswa Manggarai Barat, mahasiswa memiliki wadah untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus memperkuat solidaritas dalam mengawal kebijakan publik di daerah asal. Organisasi ini berperan dalam membentuk karakter mahasiswa yang kritis dan responsif terhadap dinamika politik, serta mendorong partisipasi aktif dalam mengawasi pembangunan daerah, khususnya di sektor pariwisata.

Berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pariwisata di Manggarai Barat tidak terlepas dari kelemahan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika lokal. Beberapa aspek yang belum terakomodasi secara optimal meliputi pengaturan mengenai konsep pariwisata berbasis lokal di Labuan Bajo dan Pulau Komodo, pengelolaan budaya pariwisata masyarakat, serta sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dan perencanaan kepariwisataan.

Demikian dalam hal perencanaan wilayah, belum adanya pengaturan yang tegas dalam undang-undang tersebut mengenai hierarki perencanaan antara perencanaan ruang dan perencanaan kepariwisataan. Minimnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum dalam rancangan pariwisata daerah turut berdampak pada kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kebudayaan serta pariwisata yang merugikan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh siaran pers WALHI yang

menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kecamatan Komodo, seperti pengembangan kawasan wisata premium seluas 400 hektare di Hutan Bowosie untuk kebutuhan energi listrik, dilakukan secara tertutup dan cenderung otoriter oleh Otoritas Pariwisata Labuan Bajo (Komite Nasional Pembaruan Agraria, 2021). Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata yang dilakukan secara tertutup dan cenderung otoriter, seperti pengembangan kawasan wisata premium, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal, termasuk penurunan pendapatan pelaku usaha kecil dan konflik terkait penguasaan lahan.

Dalam perspektif teori struktural fungsional, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai elemen yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain (Raho, 2007). Setiap elemen dalam sistem sosial memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap stabilitas dan keseimbangan masyarakat. Namun, ketika salah satu elemen tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan terjadi disfungsi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.

Dasar asumsi dalam teori struktural fungsional sebagaimana dijelaskan oleh Ralf Dahrendorf menekankan bahwa masyarakat tersusun atas elemen-elemen struktur yang relatif stabil, di mana setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari memiliki fungsi tertentu serta berlangsung dalam keteraturan interaksi antarunsur yang ada. Setiap elemen dalam struktur sosial memiliki sifat saling ketergantungan, sehingga keberadaan satu elemen akan memengaruhi dan dipengaruhi oleh elemen lainnya dalam suatu sistem sosial yang utuh. Selain itu, setiap elemen memiliki fungsi yang berkontribusi terhadap keberlangsungan dan keseimbangan sistem secara keseluruhan, sehingga masing-masing bagian memiliki peran dalam menjaga keteraturan sosial. Lebih lanjut, struktur fungsional dalam masyarakat didasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh para anggotanya, di mana konsensus nilai tersebut terbentuk melalui kesepakatan bersama, seperti kebiasaan adat, pola perilaku, serta norma-norma yang berkembang dan disepakati dalam kehidupan sosial (Damsar, 2017). Hal ini terlihat dalam konteks Manggarai Barat, di mana peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata belum berjalan optimal sehingga memunculkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, kehadiran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial menjadi penting untuk melengkapi fungsi yang tidak berjalan dengan baik dalam sistem tersebut, melalui kegiatan advokasi dan aksi sosial yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam perspektif sistem politik, kebijakan publik merupakan hasil dari proses interaksi antara input berupa tuntutan dan dukungan masyarakat dengan output berupa keputusan politik yang dihasilkan oleh pemerintah (Beddy, 2016; Winarno, 2007). Dalam hal ini, mahasiswa berperan sebagai bagian dari input sistem politik yang menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Efektivitas sistem politik sangat ditentukan oleh sejauh mana input tersebut dapat direspons secara tepat oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan publik. Namun, ketika proses tersebut tidak berjalan secara optimal, maka akan muncul ketidakpuasan masyarakat yang dapat memicu konflik sosial.

Dalam kerangka demokrasi, partisipasi aktif masyarakat, termasuk mahasiswa, merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, baik melalui mekanisme formal maupun informal, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat (Tutik, 2010; Ways, 2015). Oleh karena itu, peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial dalam mengawal politik pariwisata di Manggarai Barat menjadi sangat relevan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi naratif dalam konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2002). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis peran gerakan mahasiswa sebagai kontrol politik dalam sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Kecamatan Komodo, Nusa Tenggara Timur, dengan menelusuri berbagai informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan infrastruktur pariwisata serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara langsung dengan mahasiswa asal Manggarai Barat yang berada di Jakarta sebagai informan utama, serta didukung oleh studi dokumentasi dan kajian pustaka dari berbagai sumber literatur yang relevan guna memperkuat analisis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi terhadap

fenomena sosial yang terjadi untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dinamika kebijakan pariwisata dan respon masyarakat, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap peran mahasiswa dalam mengontrol kebijakan politik pariwisata di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat

Di Indonesia, peningkatan sektor pariwisata mampu mendatangkan pendapatan yang besar bagi daerah, khususnya wilayah yang memiliki kekayaan wisata alam dan budaya. Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Hal ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Manggarai Barat yang mulai berkembang sejak tahun 1987 ketika Komodo ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO, dan terus mengalami perkembangan hingga Komodo terpilih sebagai salah satu dari *The New Seven Wonders* pada tahun 2008. Keberadaan sektor pariwisata tidak hanya menunjang pembangunan nasional dan menambah devisa negara, tetapi juga berperan penting dalam membantu daerah dengan tingkat pendapatan asli daerah yang relatif rendah untuk meningkatkan perekonomian. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri pariwisata menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di bagian barat Pulau Flores, sehingga menjadikannya sebagai pintu masuk wilayah bagian barat Pulau Flores sekaligus salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia bagian timur. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003, Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai dengan ibu kota di Labuan Bajo. Wilayah ini memiliki potensi wisata yang sangat besar yang tersebar di berbagai gugusan pulau, seperti Labuan Bajo, Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Perkembangan aktivitas pariwisata di daerah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang dapat dilihat dari tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung setiap pekan untuk menikmati keindahan alam yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan kejelian dari pemerintah daerah, pihak swasta, dan para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan terus mengembangkan fasilitas pariwisata yang menarik dan berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo sebagai ibu kota Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa asal Manggarai Barat, yaitu Ketua Genzo, dijelaskan bahwa motivasi wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Komodo didasarkan pada daya tarik destinasi yang kuat, karakteristik permintaan wisatawan, serta preferensi terhadap pengalaman wisata berbasis alam. Selain itu, Pulau Komodo menawarkan keautentikan, kemenarikan, dan keunikan destinasi yang menjadi nilai tambah bagi wisatawan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk memperkenalkan ciri khas, keberagaman, dan budaya lokal kepada masyarakat luas yang belum pernah berkunjung ke Pulau Komodo. Dalam hal ini, pariwisata berperan sebagai katalisator pembangunan daerah yang mampu mendorong kemajuan ekonomi sekaligus pelestarian budaya lokal.

Di sisi lain, pariwisata juga berkaitan erat dengan konsep *civil society* atau masyarakat madani serta gerakan mahasiswa. Keberadaan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya menciptakan jembatan komunikasi yang positif antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah. Mahasiswa dan masyarakat berperan sebagai kelompok penyeimbang yang dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan negara melalui fungsi kontrol sosial. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai lembaga mediasi yang mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, dalam konteks ini masyarakat dan mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pranata sosial, tetapi juga sebagai lembaga pengawas yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pariwisata berjalan secara adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Kebijakan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat

Kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh pihak yang memegang kekuasaan dalam upaya menentukan tujuan serta cara untuk mencapainya (Budiardjo, 2008). Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan adalah upaya pemecahan masalah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran, yang harus memenuhi beberapa kriteria, seperti peningkatan taraf kehidupan, keadilan, serta partisipasi masyarakat. Dalam konteks pariwisata, kebijakan diarahkan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata yang mencakup regulasi, suprastruktur, dan infrastruktur. Dalam beberapa dekade terakhir, batas nonfisik antarnegara semakin sulit dibedakan dan cenderung tidak terbatas, sehingga kebijakan memiliki peran penting dalam mengarahkan masyarakat menuju ekonomi berbasis pariwisata melalui sistem politik dan penanaman modal, termasuk investasi asing, sebagai upaya memberdayakan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari aspek kelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi warga lokal.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan konservasi yang dilakukan tidak mengganggu keberlangsungan makhluk hidup melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan wisatawan agar seluruh pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga tercipta pariwisata yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan potensi serta kekayaan daerah sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting karena setiap daerah memiliki kondisi, permasalahan, dan potensi yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tersebut, jika dikaitkan dengan teori sistem dan teori demokrasi dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di Pulau Komodo, maka teori sistem memandang bahwa seluruh komponen dalam pariwisata saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembentukan kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Sementara itu, teori demokrasi memberikan kontribusi dalam menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam industri pariwisata. Sistem demokrasi memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk terlibat dan bekerja sama tanpa adanya diskriminasi, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan tidak mengalami perampasan hak oleh pemegang kekuasaan. Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai pedoman umum yang menjadi arah dalam tindakan serta aturan yang harus diikuti oleh para pelaku kebijakan, yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan masyarakat dan pengambilan keputusan berdasarkan perencanaan yang telah disepakati bersama, sekaligus sebagai instrumen pemecahan masalah atas berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Politik Kabupaten Manggarai Barat

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota. Dalam konteks negara kota pada zaman Yunani, politik dipahami sebagai proses komunikasi dan interaksi antarsesama warga untuk mencapai kesejahteraan bersama. Seiring perkembangannya, politik dimaknai sebagai proses interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kebaikan kolektif dalam kehidupan masyarakat (Seta, 2011). Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta alokasi sumber daya. Secara umum, politik dapat dipahami sebagai usaha untuk menentukan aturan yang dapat diterima oleh masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur.

Dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat, situasi politik menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Permasalahan dalam pemerintahan sering menjadi sorotan utama masyarakat, tetapi dalam banyak kasus justru diabaikan oleh pemerintah karena lebih mengutamakan kepentingan elite. Terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar elite politik lokal memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan politik mereka sendiri. Selain itu, keputusan politik yang dihasilkan sering kali tidak memberikan kepastian, meskipun masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap arah kebijakan yang diambil. Pembangunan yang dilakukan oleh elite politik di Manggarai Barat berpotensi mengancam perlindungan lingkungan, serta lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan pariwisata yang menguntungkan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat lokal maupun keberlangsungan satwa di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, jika dikaitkan dengan teori sistem dan teori struktural fungsional, fenomena politik di Manggarai Barat menunjukkan bahwa kebijakan politik, khususnya dalam sektor pariwisata, belum berjalan secara optimal dalam memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berkembang. Kebijakan yang diterapkan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian dan ketimpangan sosial. Selain itu, pembangunan dan perencanaan infrastruktur pariwisata di Pulau Komodo cenderung hanya menguntungkan elite politik lokal, sehingga fungsi sistem sosial tidak berjalan secara seimbang dan tidak mampu menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan Pariwisata yang Ditentang

Setiap pembahasan mengenai pariwisata menunjukkan bahwa pengembangan sektor ini sering kali dipandang semata-mata dalam kerangka ekonomi, padahal pada hakikatnya pariwisata juga merupakan manifestasi dari kekuatan politik ekonomi, hukum, sosial budaya, dan lingkungan yang bersifat global. Dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat, polemik terkait kebijakan pariwisata kerap menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai merugikan masyarakat dan lebih menguntungkan kepentingan segelintir pihak. Salah satu kebijakan yang menuai penolakan adalah pengambilalihan lahan masyarakat secara sepihak oleh pemerintah pusat pada tanggal 21 April 2021, dengan mengalihkan lahan seluas 400 hektar di kawasan Hutan Produksi Nggorang Bowosie kepada Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores untuk dikelola sebagai kawasan pariwisata. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa kawasan tersebut dikembangkan menjadi beberapa zona, meliputi zona budaya seluas 114,73 hektar, zona hiburan seluas 62,81 hektar, zona alam liar seluas 89,25 hektar, dan zona petualangan seluas 132,43 hektar. Namun demikian, kawasan Labuan Bajo memiliki potensi sumber daya air dan tanah yang sangat bergantung pada suplai dari hutan Bowosie, sehingga masyarakat setempat menghendaki agar lahan tersebut dimanfaatkan secara bijaksana dan tidak merugikan kehidupan mereka (de Rosary, 2021).

Selain itu, berdasarkan laporan Mongabay yang mengutip siaran pers WALHI Nusa Tenggara Timur, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di kawasan Taman Nasional Komodo juga menimbulkan berbagai kontroversi karena dianggap merugikan masyarakat setempat dan generasi mendatang. Kebijakan tersebut meliputi pemberian izin kepada perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam usaha pariwisata di zona Taman Nasional Komodo, pembagian otoritas pengelolaan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata, serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengembangan destinasi wisata eksklusif, perombakan kawasan Loh Buaya dengan pembangunan sarana dan prasarana bergaya tertentu, serta rencana pengembangan Pulau Padar untuk kepentingan pariwisata. Di sisi lain, kebijakan kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo menjadi Rp3.750.000 per orang mulai 1 Agustus 2022 juga menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo karena dianggap memberatkan wisatawan dan berdampak pada penurunan kunjungan wisata (Santosa, 2022).

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat kecenderungan pemerintah mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai, sehingga menimbulkan monopoli kebijakan dan konflik antara masyarakat dengan kelompok yang diuntungkan oleh kebijakan tersebut. Kebijakan yang berkaitan dengan perampasan lahan, kenaikan tarif, serta pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan sekitar telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, meskipun pengembangan zona pariwisata merupakan bagian dari strategi pembangunan, kebijakan yang diambil seharusnya tetap berpegang pada prinsip dasar keadilan dan tidak merugikan masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap hidup secara layak dan tenteram di wilayahnya sendiri tanpa kehilangan hak atas sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Peran Mahasiswa sebagai Kontrol Politik bagi Pelaksanaan Politik Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat

Mahasiswa merupakan generasi milenial yang diyakini mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa, sekaligus berperan sebagai penyatu serta penyambung lidah rakyat dalam upaya memajukan negara. Dalam konteks kehidupan politik, kontrol politik diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk

menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah (Subakti, 2014). Oleh karena itu, mahasiswa sebagai *agent of change* dituntut untuk mampu mengaktualisasikan perannya dalam realitas sosial. Mahasiswa diharapkan menjadi pelopor perubahan yang bersikap militan, kritis, dan bertindak dengan penuh keikhlasan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa dipandang sebagai representasi kesadaran kolektif yang memiliki amanah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, sekaligus sebagai kekuatan potensial dalam mendorong terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan. Mahasiswa juga merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena menjadi generasi penerus yang memiliki loyalitas tinggi terhadap kemajuan di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan keagamaan.

Dalam perannya sebagai agen perubahan sosial, mahasiswa senantiasa dituntut untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mengharuskan mahasiswa untuk terus bersinergi, berpikir kritis, serta bertindak secara konkret dengan dilandasi semangat kerelaan dan keikhlasan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Berkaitan dengan teori demokrasi, upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik menuntut adanya sistem yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat serta menjawab kebutuhan publik secara adil. Demokrasi menempatkan masyarakat dalam posisi yang setara secara politik dan memberikan ruang partisipasi yang terbuka serta adil dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, aspirasi mahasiswa dalam mendorong demokratisasi sistem pemerintahan, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, memerlukan proses komunikasi yang efektif sebelum kebijakan dirumuskan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

Aksi Mahasiswa Asal Kabupaten Manggarai Barat dalam Melakukan Kontrol Politik

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dinilai bertolak belakang dengan kondisi yang dialami masyarakat Manggarai Barat, khususnya di Pulau Komodo, mahasiswa asal Manggarai Barat turut berperan dalam melakukan kontrol politik melalui berbagai bentuk aksi. Kontrol tersebut dilakukan melalui demonstrasi atau aksi massa yang turun ke jalan, serta melalui media publik untuk menyoroti kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mahasiswa menilai bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah melanggar hak dan kewajiban masyarakat lokal. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman Facebook Serikat Pemuda Mahasiswa Nusa Tenggara Timur, mahasiswa menggugat pemerintah pusat dan daerah agar menghentikan segala bentuk privatisasi yang menguntungkan pemodal di kawasan Taman Nasional Komodo, sehingga masyarakat lokal dapat memperoleh kesetaraan. Selain itu, mahasiswa juga menuntut pembatalan kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo agar jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat, sehingga mampu menunjang perekonomian masyarakat setempat tanpa merusak ekosistem alam dan kebudayaan lokal.

Hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur, yaitu Saverius, menunjukkan bahwa mahasiswa asal Kabupaten Manggarai Barat yang berada di Jakarta secara aktif melakukan kontrol politik terhadap pemerintah melalui aksi demonstrasi di berbagai tempat, termasuk di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saverius menyampaikan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 mereka melakukan aksi damai jilid III di gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan bertemu langsung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan ketidaksejahteraan akibat kebijakan yang merugikan mereka, sehingga dilakukan proses negosiasi antara pemerintah dan mahasiswa agar kebijakan yang dikeluarkan dapat ditinjau kembali dan dibatalkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kembali hak-haknya. Seluruh bentuk kontrol politik yang dilakukan oleh mahasiswa pada dasarnya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang terdampak kebijakan, karena berbagai aktivitas dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dinilai lebih banyak merugikan masyarakat daripada memberikan manfaat yang berkeadilan.

Aksi Mahasiswa Jakarta Asal Kabupaten Manggarai Barat dalam Melakukan Kontrol Politik terhadap Pemerintah Daerah

Mahasiswa asal Manggarai Barat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa di daerah lain, terutama dalam hal pola pengorganisasian yang cenderung menggunakan pendekatan kekeluargaan serta proses internalisasi nilai yang kritis dan mendalam untuk membangun kesadaran kolektif. Proses ini mendorong mahasiswa untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga tergerak untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam konteks kebijakan pariwisata, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi perhatian mahasiswa, salah satunya adalah kebijakan lama yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Taman Nasional Komodo. Berdasarkan kajian Haryanto (2020), kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang izin usaha pariwisata alam di taman nasional dan taman wisata alam. Sejak diberlakukannya regulasi tersebut, beberapa perusahaan pariwisata seperti PT Komodo Wildlife Ecotourism dan PT Flobamora mulai beroperasi di kawasan Taman Nasional Komodo. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi elite politik untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut demi kepentingan bisnis.

Selain itu, kebijakan terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MNLHK/Setjen/KUM.1/3/2019 mengenai izin usaha pariwisata alam di taman hutan raya dan taman wisata alam semakin mempertegas arah pengelolaan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata yang bersifat eksklusif. Kebijakan ini turut berdampak pada penetapan harga tiket yang tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berbagai regulasi tersebut menimbulkan reaksi keras dari mahasiswa karena dinilai tidak melibatkan masyarakat lokal dalam proses perumusan kebijakan serta berpotensi merugikan mereka, terutama karena hak-hak masyarakat cenderung terabaikan oleh kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan pemerintah dan kelompok tertentu.

Oleh karena itu, mahasiswa mengambil peran aktif sebagai penyambung aspirasi masyarakat dengan melakukan kontrol terhadap pemerintah melalui aksi demonstrasi, termasuk di Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup. Aksi tersebut bertujuan untuk memperjuangkan keadilan serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat di Kecamatan Komodo. Dari serangkaian gerakan yang dilakukan, mahasiswa berhasil mendorong terjadinya dialog dengan pemerintah yang menghasilkan komitmen untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah. Dalam konteks ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya bergerak di tingkat lokal, tetapi juga mampu membawa perubahan hingga ke tingkat yang lebih luas. Oleh karena itu, peran mahasiswa perlu terus diperkuat agar proses demokratisasi di Manggarai Barat dapat berjalan secara optimal dan mampu mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa sebagai Kontrol Politik bagi Pelaksanaan Politik Pariwisata

Keadaan sosial politik di Indonesia yang semakin kompleks menuntut adanya perubahan yang signifikan, sehingga peran mahasiswa menjadi sangat dibutuhkan dan diharapkan sebagai aktor krusial dalam pembangunan dan transformasi sosial. Mahasiswa dipandang sebagai kelompok yang memiliki kapasitas intelektual dan kesadaran kritis untuk mendorong perubahan menuju sistem yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan semangat perjuangan melalui gerakan moral mahasiswa dalam ranah sosial politik agar mampu bergerak secara kolektif dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju serta memperbaiki sistem yang ada. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan beberapa mahasiswa serta Ketua Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur, dijelaskan bahwa sebagai putra daerah, mahasiswa secara aktif mengikuti perkembangan pariwisata di Pulau Komodo dari berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Ketua Genzo menyatakan bahwa dari pandangan tersebut ia menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan sebagai mahasiswa dengan melakukan advokasi secara litigasi maupun nonlitigasi apabila terdapat kebijakan yang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat. Selain itu, Ketua Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur, Saverius, menegaskan bahwa kontrol politik seharusnya dilakukan oleh putra dan putri daerah sendiri melalui berbagai cara, seperti demonstrasi maupun dialog dengan pemerintah dan pihak legislatif.

Faktor utama yang mendorong mahasiswa melakukan kontrol politik dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, adalah kesadaran mereka sebagai kelompok terdidik yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak masyarakat. Mahasiswa melihat adanya praktik monopoli yang dilakukan oleh elite politik serta minimnya penerapan prinsip demokrasi di daerah tersebut, di samping adanya pembangunan infrastruktur yang justru merugikan masyarakat lokal. Kondisi ini mendorong mahasiswa untuk menjalankan perannya sebagai *agent of change* dalam upaya mendemokratisasi sistem di daerah. Mahasiswa yang pada masa mendatang berpotensi masuk ke dalam struktur pemerintahan dipandang sebagai bagian dari elite generasi milenial yang memiliki peluang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Selain itu, adanya kesadaran untuk melindungi lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong partisipasi mahasiswa dalam pengembangan pariwisata Taman Nasional Komodo. Mahasiswa asal Manggarai Barat memahami bahwa potensi pariwisata di kawasan tersebut memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan tanpa menimbulkan kesenjangan sosial.

Upaya Pemerintah dalam Menjawab Kontrol Politik yang Dilakukan oleh Mahasiswa Asal Kabupaten Manggarai Barat

Kebijakan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah, karena pemerintah memiliki posisi strategis dalam mendorong percepatan pembangunan melalui berbagai bentuk intervensi yang terarah dan berkelanjutan. Peran tersebut menjadi krusial dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan menyeluruh, dengan tujuan utama meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam sektor pariwisata, pemerintah daerah berupaya menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan yang didukung oleh potensi alam dan budaya yang dimiliki. Namun, dalam praktik di lapangan, sering kali kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan tersebut, karena masih terdapat kecenderungan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan tertentu dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Kondisi ini mendorong pemuda dan mahasiswa untuk melakukan berbagai bentuk advokasi di berbagai wilayah, termasuk di ibu kota negara, sebagai upaya menyuarakan aspirasi masyarakat Manggarai Barat yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang ada.

Dari berbagai upaya advokasi yang dilakukan oleh mahasiswa, terdapat respons positif dari pemerintah, terutama dalam bentuk peninjauan kembali dan pembatalan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga masyarakat lokal dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Kontrol politik yang dilakukan mahasiswa melalui aksi demonstrasi dan gerakan massa juga memberikan tekanan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Sandiaga Uno, agar mencabut kebijakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo. Tekanan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat agar tidak melakukan tindakan represif terhadap masyarakat serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga lokal. Dengan demikian, gerakan mahasiswa berperan sebagai mekanisme kontrol yang efektif dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, pengembangan dan perubahan sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan adanya hasil yang positif meskipun belum optimal, seperti meningkatnya jumlah wisatawan dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kegiatan konservasi yang dilakukan tidak mengganggu keberlangsungan makhluk hidup melalui kerja sama dengan masyarakat, serta mendorong kepatuhan terhadap aturan yang telah dirancang, sehingga tercipta keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan kelestarian lingkungan.

SIMPULAN

Pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Manggarai Barat yang mengalami perkembangan signifikan sejak ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO pada tahun 1987 dan semakin meningkat setelah terpilih sebagai salah satu dari *The New Seven Wonders* pada tahun 2008. Perkembangan tersebut mendorong masuknya investasi yang berdampak pada perubahan struktur ekonomi masyarakat lokal, terutama peralihan mata pencaharian ke sektor jasa pariwisata. Dalam konteks ini, politik dan pariwisata memiliki peran strategis sebagai katalisator pembangunan daerah, di mana politik berfungsi dalam menentukan arah kebijakan publik sesuai kepentingan penguasa yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sementara pariwisata menjadi sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta memperluas interaksi sosial dan budaya.

Di sisi lain, peran mahasiswa asal Kabupaten Manggarai Barat, khususnya yang berada di Jakarta, menunjukkan kontribusi yang signifikan sebagai *agent of change* dan kontrol sosial dalam mengawal kebijakan politik pariwisata di Pulau Komodo. Melalui aksi massa dan berbagai bentuk advokasi, mahasiswa berupaya memperjuangkan hak, kebebasan, dan keadilan bagi masyarakat lokal agar tidak terpinggirkan oleh kebijakan yang tidak berpihak. Gerakan tersebut menjadi bagian dari proses demokratisasi yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam setiap tahapan pembangunan, serta memperkuat sinergi dengan mahasiswa agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, I. D. G. (2011). *Demokrasi, HAM dan Konstitusi Demokrasi Indonesia*. Setara Press.
- Beddy, M. I. (2016). *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. (2017). *Pengantar Teori Sosiologi*. Kencana.
- de Rosary, E. (2021). *Alih Fungsi Hutan Bowosie jadi Pariwisata Labuan Bajo*.
- Haryanto, V. (2020). *Kebijakan Kontroversi di Taman Nasional Komodo*.
- Komite Nasional Pembaruan Agraria. (2021). *Hentikan Perampasan Tanah dan Represifitas dengan Alasan Pembangunan Pariwisata Premium Labuan Bajo*.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.
- Santosa, D. A. (2022). *Tarif ke Taman Nasional Komodo Rp 3,75 Juta Bikin Resah*.
- Schumpeter, J. A. (2011). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Rajagrafindo Persada.
- Seta, B. (2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Indie Book Corner.
- Subakti, M. (2014). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media Group.
- Ways, M. A. (2015). *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*. Gramedia.
- Winarno, B. (2007). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. PT Buku Kita.